

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup, dari rangkaian penulisan skripsi ini penulis merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran yang bermanfaat bagi peranan kolaborasi pemerintah desa dan Lembaga adat dalam pembangunan desa didesa nemboramba.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti dapat Mengetahui peran pemerintah desa dalam Melakukan sosialisasi bersama terhadap nilai-nilai atau tradisi budaya yang akan dilaksanakan dalam bentuk formal maupun informal, dan pemerintah diberi tanggung jawab merumuskan tentang pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama dan mengetahui peran lembaga adat dalam bertanggungjawab untuk merawat tradisi dan memberi sangsi adat terhadap yang melanggar norma adat, sehingga dapat diteguhkan dengan Adanya pertemuan formal dan informal, Adanya Sosialisasi bersama tentang program pembangunan desa dan pelaksanaan perdes, dan pemerintah desa diberi tugas untuk merumuskan rencana pembangunan dan lembaga adat diberi tugas untuk menggerakkan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa Pembangunan merupakan suatu proses, yang artinya bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.

Pembangunan juga merupakan usaha-usaha yang dilakukan dengan motivasi dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan itu baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, dan membuahkan suatu perubahan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini menjadi pedoman arah pembangunan Desa Nemboramba ke depan sehingga dapat terwujudnya kualitas SDM berbasis keunggulan dan kemandirian sesuai cita-cita masyarakat Desa Nemboramba yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa.

Pelaksanaan kegiatan didesa nemboramba selalu melaksanakannya dengan pertemuan formal maupun informal dikarenakan semua masyarakat desa Nemboramba harus mengetahui jelas Perencanaan Pembangunan desa dan juga rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

6.2 Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti diharapkan turun langsung kelokasi dan melihat langsung kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan, agar peneliti lebih jelas dan juga pelajaran bagi peneliti bagaimana cara mengolah desa dan lebih teliti pada bagian pembangunan desa.

Membangun suatu desa sangat tidaklah mudah, semua perencanaan desa harus direncanakan dengan baik, dan juga tidak terlepas dari adat dan budaya, jadi segala kegiatan yang dilakukan pemerintah desa haruslah dimusyawarkan dengan masyarakat dan dibicarakan terlebih dahulu pada lembaga adat, agar apa yang direncanakan pemerintah desa dalam pembangunan desa, bisa berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, Amin. 2009. Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: PT Refika Aditama.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama.
- Laksana, Nuring Septiyasa. 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Nasution, Zulkarimen. 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Bachtiar. 2002. Hal Utama dalam Pembangunan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pahmi. 2010. Perspektif Baru Antropologi Pedesaan. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Patton, Adri. 2005. Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Emily R. Lai, *Collaborations: A Literature Review*, (Pearson, 2011), hlm. 2.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, (AMACOM, 1995),
Journal "Acta Diurna" Volume III. No.4 Tahun 2014
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009)
- Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), hh. 34-35.
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004)
- Dwi Narwoko, J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
- Poerwandari. (2009). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3UI, hal. 241
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Laporan Perkembangan penduduk desa Nemboramba Tahun 2019